

RANCANGAN

CATATAN RAPAT KERJA KOMISI III DENGAN WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Kamis, 6 September 2018.
Waktu	: Pukul 10.50 – 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Wakapolri dibuka pukul 10.50 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Kahar Muzakir, dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Pembahasan RKA-K/L 2019
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Wakapolri, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas (surat Kapolri Nomor: B/1563/III/REN.2.1./2018 tanggal 14 Maret 2018) sebesar Rp. 126,8 Triliun terdiri dari belanja pegawai Rp. 49,9 Triliun, belanja barang Rp. 36,5 Triliun (termasuk kebutuhan anggaran pengamanan Pemilu tahun 2019 sebesar Rp. 5,0 triliun) dan belanja modal Rp. 40,3 triliun. Selanjutnya sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor: S-269/MK.02/2018 dan nomor: B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tanggal 16 April 2018 hal pagu indikatif K/L tahun 2019, telah ditetapkan pagu indikatif polri T.A. 2019 sebesar Rp. 76,9

triliun, termasuk kebutuhan anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp. 2,3 triliun.

- Penetapan Pagu Indikatif tersebut di atas, apabila dilihat dari usulan Polri terpenuhi 60,62%, sedangkan apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran T.A. 2018 sebesar Rp. 95 Triliun secara umum berkurang sebesar Rp. 18,1 Triliun atau minus 19,08%.
- Pagu Indikatif Polri T.A. 2019 telah dibahas dalam Rapat Trilateral antara Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas dan Polri dengan kesepakatan Per Jenis Belanja dan sumber anggaran sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 43,2 Triliun (Terpenuhi 86,49%);
 - b. Belanja Barang : Rp. 26,0 Triliun (Terpenuhi 71,10%);
 - c. Belanja Modal : Rp. 7,6 Triliun (Terpenuhi 19,06%).
- Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan Pagu Anggaran Polri T.A. 2019 sebesar Rp. 76,2 Triliun (sebagaimana Surat Bersama Nomor: S-536/MK.02/2018 Dan Nomor: B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L T.A. 2019), dalam surat tersebut terdapat catatan sebagai berikut:
 1. Bahwa Pagu Anggaran termasuk:
 - a. Belanja Ops Pegawai (Komponen 001) : Rp. 43,2 Triliun;
 - b. Belanja Ops Barang (Komponen 002) : Rp. 5,3 Triliun;
 - c. Belanja Ops Hankam (Komponen 003) : Rp. 10,0 Triliun;
 - d. Anggaran Kesehatan : Rp. 2,0 Triliun;
 - e. Anggaran Pemilu & Pasca Pemilu : Rp. 2,3 Triliun.
 2. Pembatasan (*Capping*) Alokasi Belanja Barang Tahun 2019 (Termasuk Belanja Barang Operasional dan Non Operasional untuk seluruh Sumber Dana) Sebesar Rp. 22,5 Triliun.
- Penetapan Pagu Anggaran Polri T.A. 2019 Sebesar Rp. 76,2 Triliun tersebut apabila dibandingkan dengan Pagu Indikatif Polri T.A. 2019 sebesar Rp. 76,9 Triliun secara umum berkurang sebesar Rp. 688 Miliar atau minus 0,72% pada Jenis Belanja Barang, terdiri dari:
 - Penghematan Sumber Dana Rupiah Murni (RM) sebesar: Rp. 270 Miliar;
 - Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp. 418 Miliar, karena adanya pengurangan target PNBP dari Jenis Pendapatan Pengesahan STNK dihentikan penarikannya.
- Alokasi Pagu Anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran di lingkungan Polri terutama yang bersumber dari Rupiah Murni dihadapkan dengan berbagai kebutuhan pada masing-masing belanja. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan pengamanan Pemilu Tahun 2019, **Polri telah mengusulkan tambahan anggaran sesuai dengan Surat Nomor:**

B/459/REN.2.3./VI/ 2018/SRENA Tanggal 26 Juni 2018 Kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp. 44,4 Triliun terdiri dari:

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 6,7 Triliun untuk memenuhi perkiraan kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri pada Polri (termasuk kebutuhan gaji/tunjangan hasil rekrutmen tahun 2018 dan 2019 serta Peningkatan Tunjangan Kinerja Polri menjadi 70% sebagaimana hasil Penilaian dan Persetujuan Kementerian PAN dan RB);
 - Belanja Barang sebesar Rp. 5,0 Triliun, yang diprioritaskan untuk meningkatkan operasional Kepolisian terkait Pemenuhan : Kebutuhan Anggaran Pengamanan Pemilu Tahun 2019 sebesar Rp. 2,7 Triliun, Biaya Pemeliharaan Fasilitas dan Materiil Pengadaan Tahun 2017 dan 2018 Sebesar Rp. 735 Miliar, Kebutuhan BBM untuk alat transportasi Pengadaan Tahun 2017 Dan 2018 sebesar Rp. 1,0 Triliun, meningkatkan kinerja fungsi teknis kepolisian dibidang lidik sidik tindak Pidana sebesar Rp. 532 Miliar dalam rangka meningkatkan penyelesaian Tindak Pidana Umum, Peningkatan Penanganan/Penyuluhan Hukum Pencegahan Kejahatan dan Penyalahgunaan Narkoba serta Penguatan Densus 88 AT Polri;
 - Belanja Modal sebesar Rp. 32,6 Triliun, yang diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, penanganan gejolak sosial dan penanganan Flash Point antara lain:
 1. Pembangunan fasilitas gedung kantor Polda, Polres dan Polsek yang belum memiliki gedung kantor;
 2. Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Dan Perbaikan/ Renovasi Gedung Kantor Untuk Pelayanan Publik Yang Tidak Layak, Termasuk Sarana Prasarana Ruang Pelayanan Kepolisian Dan Lembaga Pendidikan;
 3. Pembangunan Rumah Dinas Bagi Personel Polri Secara Bertahap;
 4. Penambahan Peralatan Bhabinkamtibmas, Peralatan Phh, Peralatan Dalmas, Persenjataan, Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Alat Transportasi, Peralatan Deteksi Dan Forensik, Peralatan Polairud, Peralatan Kesehatan Serta Peralatan Mesin Kantor.
2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Mendukung usulan mitra dan akan didalami, meminta Asrena membuat plan B jika usulan tidak dipenuhi.
 - Mendukung usulan tambahan Polri dan mengapresiasi atas keamanan Asian Games. Agar usulan ini segera dibawa ke Rapat Pleno Komisi III.
 - Mendukung anggaran yang diusulkan polri, berharap agar serapan anggaran tepat sasaran dan tepat waktu, bahwa usulan akan di dalam
 - Bahwa anggaran yang diusulkan realistis dan setuju untuk diteruskan.
 - Bahwa anggaran polri kurang ideal sebetulnya namun karena kondisi keuangan negara belum memungkinkan sehingga menyetujui usulan tersebut, berharap

agar *blue print* dan grand strategi Polri dapat terlaksana, berharap agar pagu indikatif bisa diperjuangkan, berharap agar kasus-kasus yang ada di Jakarta maupun daerah bisa ditindaklanjuti.

- Bahwa seharusnya anggaran polri naik, apalagi menjelang pemilu, setuju dengan usulan penambahan anggaran
- Menyetujui dan mendukung sepenuhnya usulan tambahan Polri sebesar Rp.44,4 trilyun, berharap kemampuan polri semakin baik dalam mendeteksi ancaman keamanan
- Bahwa menjelang agenda politik 2019, mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran polri karena sangat realistis
- Menyetujui usulan anggaran dan usulan tambahan anggaran, berharap ada koordinasi yang baik antara polri dengan Komisi III terutama menjelang pemilu 2019.
- Bahwa semua fraksi sudah setuju dengan usulan polri dan tidak perlu diundang kembali dalam rapat berikutnya.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

